BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi mengenai posisi keuangan dalam hasil-hasil yang telah dicapai oleh organisasi yang bersangkutan (Munawir, Triyanti 2017;12). Laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk mengetahui pemerintahan itu berjalan baik atau tidak. Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila yang dihasilkan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010) antara lain relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Pada kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah masih terdapat data-data yang disajikan tidak sesuai dan tidak mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Padahal banyak pihak yang mengandalkan informasi keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan keputusan.

Informasi merupakan suatu data yang diorganisasi yang dapat mendukung ketepatan pengambilan keputusan. Informasi yang berkualitas dapat terbentuk dari adanya sistem informasi yang dirancang dengan baik. Sistem informasi dalam suatu organisasi merupakan suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan organisasi. Sistem ini

menyimpan, mengolah, dan mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi. Menurut Wiyandari (2018) sistem informasi merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan data dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menyajikan informasi.

Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, efektivitas merupakan suatu ukuran atau gambaran yang memberikan seberapa jauh tujuan dapat dicapai baik secara kualitas maupun waktu, orientasinya pada output yang dihasilkan (Tamiarta, 2019). Efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi dalam suatu perusahaan dapat dilihat dari bagaimana pemakaian sistem tersebut dapat mengidentifikasi data, mengakses data, dan menginterpretasikan data dengan baik.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya memperoleh penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Menurut BPK ada 3 jenis pemeriksaan yang dilakukan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Terdapat empat opini yang diberikan BPK meliputi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dan Tidak Wajar (TW) (http//:www.bpk.go.id). Berdasarkan temuan BPK sebagian besar laporan keuangan yang memperoleh opini WDP bermasalah pada pencatatan aset/barang milik daerah. Pada umumnya itu terjadi karena pencatatan, keberadaan fisik dan

pengungkapannya dalam laporan keuangan belum memadai (Christanti, 2013).

Berlakunya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menitik beratkan pada daerah kabupaten/kota memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan daerah itu sendiri dalam mengelola dan memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia.

Wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah daerah diperlukan adanya aparat birokrasi yang semakin bertanggung jawab. Nurcholis (Nurendah,2015:1) menjelaskan bahwa melalui sistem pemerintah daerah, Pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang diserahkan kepadanya. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak sekedar melaksanakan ketentuan dari pusat tapi membuat rencana, melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasinya sendiri. Dalam hal ini pengambilan keputusan berada di daerah, begitu juga tentang pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawabannya. Melalui cara ini maka rentang kendali menjadi lebih pendek, koordinasi lebih mudah, dan evaluasi lebih efektif karena semua kebijakan dan pertanggungjawabannya terletak di daerah.

Menurut Widjajanto (Nurendah,2015:28), Sistem informasi akuntansi adalah susunan formulir, catatan, peralatan termasuk komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaannya dan laporan yang terkoordinasi secara erat yang didesain untuk mentransformasikan data

keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen. Menurut Bodnar and Hopwood (2007), sistem informasi akuntansi (SIA) merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi, informasi tersebut dikomunikasikan kepada para pembuat keputusan. Menurut Silviana dan Anthoni (2014), Salah satu faktor pendukung kualitas laporan keuangan adalah sistem informasi akuntansi, dimana laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses yang didasarkan pada input yang baik, proses yang baik dan output yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Adiputra (2014) yang menjelaskan terdapat pengaruh yang positif antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Chairina (2019) mendapatkan hasil penelitian sejalan dengan Sari dan Adiputra dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah kota Surabaya. Penelitian lainnya oleh Untari dan Moh (2015) yang menyebutkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Namun dalam penelitian Saipullah (2017) memperoleh hasil sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keungan, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *software* informasi akuntansi belum mampu

mengimprove standar akuntansi di Iran, *software* informasi akuntansi belum berkaitan dengan sistem keuangan dengan sistem manajerial. Sistem informasi akuntansi belum mampu memberikan semua informasi yang dibutuhkan perusahaan, sistem informasi akuntansi belum mampu memberikan informasi kesemua level manajemen, dan sistem informasi akuntansi di masa lalu fokus pada pencatatan, peringakasan, validasi transaksi keuangan organisasi.

Laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik, tidak terlepas dari penerapan sistem pengendalian internal yang baik. Melalui penguatan sistem pengendalian internal, diharapkan upaya perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah lebih dipacu agar kedepannya dapat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Sebab laporan keuangan yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian berarti laporan tersebut dapat dipercaya sebagai alat pengambil keputusan oleh para pemakai laporan keuangan. Selain itu penerapan sistem pengendalian internal dapat mencegah adanya suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektifitas, dan dapat mencegah kerugian Negara (Udiyanti, Atmadja, & Darmawan, 2014).

Pengendalian intern disusun agar pelaporan keuangan dapat memenuhi asas ketertiban yang merupakan cerminan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Perwujudan dari asas ketertiban tersebut adalah dengan penyampaian pelaporan keuangan secara tepat waktu, Mirnayanti (Roshanti, Sujana, & Sinarwati, 2014). Menurut penelitian dari Reza (2017) menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Interen memberikan

pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, begitu pula dengan penelitian Faisol (2016) sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan. Ditambah lagi dengan penelitian Andriani (2019) yang menyebutkan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di PDAM Tirtawening Kota Bandung. Sedangkan penelitian Mokoginta (2017) menyebutkan bahwa "Pengendalian Intern berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hasil penelitian ini berarti sistem pengendalian intern yang telah dijalankan sudah baik namun dalam penerapannya belum efektif dan efisien sehingga berpengaruh terhadap kurangnnya kualitas laporan keuangan pemerintah". Namun penelitian Yendrawati (Saipullah (2017) memperoleh hasil bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu. Akan tetapi selain sumber daya manusia, ada hal penting lain yang harus diperhatikan yaitu pengendalian intern akuntansi. Hal pertama yang mempengaruhi kehandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah adalah kualitas sumber daya manusia. Menurut Wahyono (Roshanti, dkk 2014) menyatakan, dalam menghasilkan suatu informasi yang bernilai, menyangkut dua elemen pokok yaitu informasi yang dihasilkan serta sumber daya yang menghasilkannya.

Sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik dan sesuai bidangnya sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan, maka semakin baik untuk pengambilan keputusan (Roshanti, dkk, 2014).

Menurut penelitian Kiranayanti (2016) menyebutkan bahwa kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Begitu pula dengan penelitian Nurilah (2016), yang mendapatkan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia (KSDM) mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Trisnawati (2018) yang menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun berbanding terbalik dengan itu. Syarifudin (2015) mendapatkan hasil bahwa Kompetensi SDM tidak berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD, artinya meningkatnya variasi kompetensi tidak berpengaruh terhadap peningkatan kualitas LKPD. Begitu pula dengan penelitian Arif dan abral (Saipullah, 2017) menemukan bahwa sumber daya manusia tidak mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah artinya tinggi rendahnya kualitas sumber daya manusia tidak berkaitan dengan kinerja keuangan.

Penelitian Saifulah (2017) disebutkan bahwa Penggunaan dari sistem informasi akuntansi tidak akan berjalan maksimal ketika tidak didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang baik dalam suatu instansi

pemerintahan daerah begitu pula sebaliknya. Dalam penelitian tersebut juga dikatakan bahwa penggunaan sistem informasi akuntansi dan kualitas sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak akan berjalan dengan baik ketika tidak didukung dengan sistem pengendalian internal yang memadai dalam suatu intansi pemerintahan daerah. Dengan meningkatnya sistem pengendalian internal akan memberikan dampak terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai kualitas laporan keuangan daerah yang baik, maka diperlukan penerapan sistem informasi akuntansi yang berjalan maksimal, penerapan sistem pengendalian interen yang baik dan di dukung oleh kualitas sumberdaya manusia yang baik dalam suatu instansi pemerintah daerah.

Namun demikian, karena adanya perbedaan hasil dari beberapa penelitiiaan sebelumnya, terkait variabel sistem pengendalian interen, kualitas sumber daya manusia dan sistem informasi akuntansi terhadap variabel kualitas laporan keuangan yang menunjukan hasil yang tidak kosisten, maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian baru dengan mengggunakan ke tiga variabel tersebut dengan variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di kabupaten Bangli.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Study Kasus Pada SKPD Kabupaten Bangli).**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikann diatas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1) Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
2) Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
3) Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
2) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan

informasi atau masukan-masukan dalam upaya menambah bacaan di perpustakaan Universitas Mahasaraswati Denpasar dan dapat digunakan sebagai referensi tambahan serta meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai pengaruh sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern dan kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten (SKPD) Bangli, penelitian ini memberikan wawasan tentang pengaruh sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah dan dapat berjalan dengan baik serta informasi yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi perusahaan dan masyarakat.